

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENAHANAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Oleh : I Nyoman Arnita¹

Abstract

This thesis starts from the number of detention which acts in conflict with human rights. Detention is often done without regard to the terms of subjective and objective requirements as contained in the Code of Criminal Procedure. Arbitrary action by the investigator in conducting forceful measures without proper procedures so that suspects often ignores the presumption of innocence. This study uses the research literature and the condition directly into custody and then described in the findings and analysis. Law in Indonesia has guaranteed rights of the accused in various laws and regulations in force in Indonesia, including UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, CAT and others. Subjective and objective eligibility is not in accordance with human rights principles often caused minor criminal suspects were arrested and the children were placed suspect findings together with adult prisoners and female prisoners who often have double punishment, the guarantee of the rights of suspects includes a general right, the right to health etc.

Keywords: *human right, suspect*

A. PENDAHULUAN

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara.

Kekerasan, intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interograsi) sangat sulit dibuktikan. Apalagi bila tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tersebut tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari keadilan yang telah dilakukan oleh tersangka, untuk menjamin sahnya sebuah penangkapan dan penahanan. Hal ini semakin membuktikan lemahnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang hukum dan HAM.

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum)². Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*). Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Adakah jaminan perlindungan HAM bagi tersangka untuk tidak diperlakukan sewenang-sewenang dalam penahanan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam penahanan ditinjau dari aspek HAM?

C. METODE PENELITIAN

Thesis dengan judul “Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia” ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi dan praktisi dalam mendapatkan gambaran secara hukum dan implementatif tentang penahanan tersangka dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³ Sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahan hukum primer, diantaranya yaitu: UUD 1945 dan Amandemennya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum sekunder, yaitu: Literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal, laporan hasil penelitian dan sumber keputakaan lainnya termasuk informasi melalui internet. Bahan hukum tersier, yaitu kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan sumber-sumber bahan hukum tersier lainnya. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

²Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pegabdian Hukum. universitas indonesia, Jakarta. Hlm 25.

³Soerjono Soekanto dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995,hal. 12-13.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴ Setelah semua data diperoleh maka digunakan analisa kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif, logis dan sistimatis. Selain itu digunakan pula analisis komperatif untuk membandingkan antara beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk teori-teori berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam hal penahanan.

D. PEMBAHASAN

1. Jaminan Perlindungan HAM Tersangka Dalam Penahanan.

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.⁵

Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum.

Panduan penyidik dalam memeriksa tersangka adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun UU ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman namun UU ini telah cukup memberikan perlindungan HAM tersangka. Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.⁶

Indonesia juga telah meratifikasi dan mengadopsi CAT dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauann Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hal 12-13.

⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumni, 1992, hlm 29.

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tujuan konvensi ini adalah menentang segala bentuk “Penyiksaan” baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. UU ini juga meminta kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Serta harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompensasi. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan di depan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa.

Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Pengaturan tentang praperadilan ada dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 10 yang berbunyi:

- a. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

⁷ Pasal 1 UU HAM

- b. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- d. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas kembali di dalam Pasal 77 KUHAP pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal-hal yang dibicarakan dan diputus dalam praperadilan menyangkut keabsahan penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi. Pasal 79 KUHAP menentukan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi, apabila tersangka/terdakwa menganggap bahwa penahanannya tidak sah, dapat mengajukan keberatan melalui tuntutan praperadilan.

Lembaga praperadilan bertujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan tindak pidana khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, serta untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Prakteknya, di lapangan seringkali praperadilan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Hal ini menyebabkan pengajuan praperadilan oleh tersangka/terdakwa gugur dalam persidangan. Praperadilan yang menyangkut tentang perilaku aparat penegak hukum yang sewenang-wenang seringkali berakhir dengan putusan menolak tuntutan tersangka.

Komnas HAM ada berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan fungsi Komnas HAM adalah untuk menciptakan kondisi kondusif dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan kunjungan ke tempat penahanan dan melakukan wawancara mendalam dengan orang yang terampas kemerdekaannya serta mengadakan observasi terhadap tempat penahanan. Walau tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kunjungan-kunjungan tersebut secara rutin. Kunjungan yang dilakukan bersifat sporadis, didasarkan atas pengaduan yang masuk di Komnas HAM. Lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah lembaga pengawas pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. LSM seringkali menjadi *shadow report* terhadap laporan negara dihadapan majelis umum PBB.

Upaya perlindungan hak tersangka dalam penahanan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat Rancangan Undang-Undang

Hukum Pidana dan Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dalam penahanan.

2. Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam penahanan ditinjau dari aspek HAM.

Upaya paksa yang pertama kali dilakukan setelah diketahuinya ada bukti permulaan yang cukup dalam suatu tindak pidana dalam adalah penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu harus dipastikan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan yang terselubung dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penangkapan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat penangkapan dan dibacakan mengenai hak-hak yang didapat oleh tersangka. Hal ini seringkali luput dilakukan oleh penyidik dengan alasan mencegah agar tersangka tidak kabur dan menyembunyikan barang bukti, dari pernyataan 3 orang tersangka yang kami tanyakan hanya satu orang yang menyatakan bahwa penyidik menjelaskan kepadanya mengenai alasan penangkapan, sedangkan untuk surat penangkapan semua menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak diberikan.⁸ Pada saat proses awal seperti penangkapan, seringkali tersangka mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan pengakuan seorang tersangka, pada saat ditangkap mengalami kekerasan dengan dipukul dibagian tulang rusuk kiri sebanyak satu kali.⁹

Kewenangan untuk melakukan penangkapan hanya diberikan kepada penyidik, sedangkan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim pada semua tingkat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menentukan bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini mempertegas bahwa selain ketiga institusi tersebut, institusi lain tidak dibolehkan melakukan penahanan.

Penahanan seringkali dilakukan tanpa mempedulikan isi Pasal 21 KUHAP. Terutama mengenai ancaman hukuman, seringkali diabaikan yang akhirnya menyebabkan siapapun yang dianggap sebagai tersangka maka akan dilakukan penahanan terhadapnya berapapun lamanya ancaman hukuman, tindakan ini akan berakibat pada penuhnya tahanan sedangkan fasilitas yang diberikan sangat kurang.

Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negative dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, di cap sebagai pelaku tindak pidana sebelum

⁸Hasil wawancara mendalam dengan tersangka, manado, 5 november 2012

⁹ Hasil wawancara dengan tersangka, manado, 5 november 2012

adanya kekuatan hukum yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah. Pandangan masyarakat ini sangat merugikan tersangka dan keluarga, asas praduga tidak bersalah terabaikan.

Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektifitas pelaku atau hanya berdasarkan ketidaksukaan pada seseorang yang akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan rakyat kecil sering menjadi korban yang ditangkap hanya karena masalah sepele/tindakan pidana ringan.

Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum terjadi. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Tindakan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan tentang terjadinya tindak pidana sulit dibuktikan karena tidak bisa diproses secara hukum, dikarenakan tersangka masih dalam tahanan yang mengakibatkan tidak bisa melakukan visum.¹⁰

Proses penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, berikut dipaparkan mengenai implementasi dari kedua syarat tersebut. Syarat Subyektif yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu syarat obyektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subyektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat obyektif dan dalam hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis.

Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, namun syarat subyektif sifatnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi tersangka. Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Dasar kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di

¹⁰ Komnas HAM, *Pembaruan RUU KUHAP*, 2011

tingkat penyidikan telah selesai, maka BAP harus segera dilimpahkan pada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum dari pengadilan serta pemeriksaan adalah dipengadilan.

Syarat obyektif ini sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi kesalahan dalam mengualifikasikan perbuatan yang dipersangkakan atau didakwakan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Perbuatan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pencurian ringan, namun penyidik dan penuntut umum menjadikan pencurian biasa (yang diancam dengan pidana lima tahun) sebagai dasar sangkaan/dakwaan. Akibatnya, tersangka/terdakwa dapat, dikenakan penahanan.

Berbeda dengan syarat obyektif yang relatif lebih mudah dipahami, persoalan akan semakin rumit ketika memasuki syarat subyektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran itu sangat subyektif, sehingga penerapannya sangat berpotensi menyimpang dari tujuan pembuatannya, dengan kata lain sangat mungkin disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, dan ini telah terbukti dalam praktik. Penegak hukum melakukan penahanan hanya karena diperbolehkan Undang-Undang, bukan karena adanya kekhawatiran berdasarkan penilaian obyektif, sehingga penahanan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara substantif.

Penyimpangan pelaksanaan penahanan tersebut dapat di rasakan pada berbagai kasus, termasuk kasus yang dianggap kecil dan sederhana dan pelakunya tetap ditahan, seperti pada beberapa kasus yang mencuat pada dua tahun terakhir antara lain kasus yang dikenal dengan kasus nenek Minah, kasus Basar Suyanto dan Kholil, Manisish, Juwono, dan kasus sepasang suami istri Supriono-Sulastri.

Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia. Keadilan dan keadilan adalah rasa yang rasional diruang publik, keberadaannya melampaui hukum prosedural atau hukum acara yang sering menjadi alat untuk melukai rasa patut dan adil. Oleh karena itu, sudah saatnya sekarang hukum lebih mendahulukan kebenaran substantif dalam menegakkan hukum. Hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap telah cukup mempertemukan dua kepentingan yakni kepentingan umum untuk menegakkan hukum dan kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya. Namun, persoalan yang terjadi dalam penerapan pasal ini adalah masalah penerapan hukum yang masih kurang melindungi hak asasi manusia.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP secara bersyarat terkait tiga alasan penahanan yang seringkali ditafsirkan subjektif. Alasan subjektif dinilai tidak memiliki batasan atau ukuran yang jelas dan akhirnya akan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Dan Pasal ini juga dinilai

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD1945. Untuk menjaga dan melindungi tersangka dari pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan, KUHAP mengatur tentang penagguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang. Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.¹¹

Penangguhan penahanan ini seharusnya berlaku juga bagi perempuan yang masih mempunyai anak balita yang tentu masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang orang tua terutama ibu. Anak masih membutuhkan perlindungan dari orang tua dan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.¹² Penangkapan dan penahanan terhadap anak dibawah umur seharusnya merupakan alternative terakhir yang dilakukan karena upaya yang sebenarnya harus dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum bukanlah penahanan namun upaya pendidikan dan rehabilitasi. Dalam penahanan yang seringkali mengalami kekerasan selain anak adalah perempuan.

Perempuan menjadi selalu menjadi obyek penderita, pada saat pemeriksaan perkara, seringkali perempuan mengalami pelecehan seksual dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang akhirnya akan mengakibatkan korban menjadi depresi. Pelecehan seksual ini seringkali tidak bisa dibuktikan katena tekanan dan ketakutan dari tersangka untuk melaporkannya yang akhirnya kejadian ini sulit untuk dibuktikan.

Perempuan akhirnya mengalami penderitaan ganda karena merupakan delik aduan yang harus dilaporkan sendiri oleh korban rasa malu juga merupakan salah satu factor mengapa tersangka tidak mau melaporkan dan mengajukan pembuktian terjadinya pelecehan seksual dan tindakan lainnya. Penderitaan lainnya adalah korban yang berada dalam tahanan yang notabene bersama dengan pelaku.

KUHAP mengatur penahanan diterapkan sama antara tersangka laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan kondisi perempuan yang berbeda dan khusus. Jaminan hukum humaniter internasional memberi perempuan apa yang sering disebut sebagai sistem perlindungan hukum 'berjenjang-dua'. Artinya, perempuan diberi perlindungan umum yang sama

¹¹M. Yahya Harahap, Op Cit *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, hal.215

¹² Serafina Shinta Dewi, Perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah>, diakses pada 17 november 2012

dengan laki-laki sekaligus perlindungan khusus atas kebutuhan mereka sebagai perempuan.

Hak umum dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka telah masuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Implementasi dalam HAM, hak umum masuk dalam hak atas rasa aman seperti yang terdapat dalam *ICCPR*. Menurut komentar Umum Hak Sipil Politik No. 8 Pasal 9 Paragraf 1 menyatakan bahwa Pasal 9 yang mengatur mengenai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi orang-orang seringkali dipahami secara sempit dalam laporan Negara-negara Pihak karena mereka memberikan informasi yang tidak lengkap. Komite mengidentifikasi bahwa ayat 1 berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain.¹³ Beberapa dari ketentuan Pasal 9 (sebagian dari ayat 2 dan keseluruhan ayat 3) hanya berlaku bagi orang-orang yang dikenai dakwaan pidana. Tetapi selebihnya, dan secara khusus pentingnya jaminan yang ditetapkan di ayat 4, misalnya hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan, berlaku bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan yang di Indonesia lebih dikenal dengan praperadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diartikan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selain itu ada beberapa ketentuan yang mendasari hak atas perawatan kesehatan bagi tersangka seperti yang terdapat dalam Pasal 58 KUHAP jelas bahwa tersangka berhak mendapat layanan kesehatan yang maksimal. Namun, terdapat kelemahan dalam Pasal ini yaitu secara *a contrario* ketentuan Pasal ini menghilangkan kewajiban Negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh tersangka/tahanan.

Seorang tersangka di Polresta Manado menyatakan bahwa dirinya mendapatkan obat-obatan jika sakit ringan dan jika mengalami sakit yang membutuhkan perawatan intensif, maka akan diantarkan ke Rumah Sakit Bhayangkara terdekat. Tersangka yang sedang mengalami sakit, tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, agar hak asasinya tidak terlanggar. Dan dalam keadaan yang sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif, maka tersangka dapat meminta kepada penyidik agar dilakukan pembantaran penahanan terhadap dirinya.

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan pemberian kebijakan berupa pemberian ijin untuk melakukan perawatan kesehatan bagi tahanan dengan melakukan pembantaran penahanan tersangka yang dikenal dengan diskresi. Seorang tersangka/terdakwa berhak atas penghormatan terhadap keyakinan religius dan kepercayaan kultural dari suatu kelompok

¹³ Komnas ham, opcit

yang diikuti oleh para tahanan kapanpun diperlukan merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Pasal 29 UUD1945, Pasal 22 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan hak dari setiap tahanan dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan perawatan rohani karena merupakan hak asasi dari semua individu untuk dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi. Informasi yang kami dapatkan menyatakan bahwa “Selama ditahan Saya diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama saya Kristen Protestan setiap hari Sabtu dan Minggu dan pihak Polresta mendatangkan Pendeta yang memimpin Ibadah didalam ruang tahanan”

Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga. Kunjungan ini dilakukan secara langsung atau dengan perantara penasehat hukum, baik untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara maupun dalam rangka mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan dan bantuan hukum. Kunjungan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan oleh penyidik. Pernyataan salah seorang tersangka yang diwawancarai menyatakan bahwa kunjungan dijadwalkan setiap hari Selasa dan Kamis. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Dalam pemenuhan hak ini, penyidik harus memberikan keleluasaan dan menyediakan alat tulis menulis.

Penyidik tidak mempunyai hak untuk memeriksa surat yang ditulis oleh tersangka tanpa terkecuali. Karena ini melanggar hak privat dari tahanan yang bebas berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus dibatasi. Observasi yang dilakukan penulis pada tempat penahanan tersangka dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan dan pemenuhan HAM, hal ini disebabkan karena tempat tahanan yang tidak disertai dengan tempat tidur/alas tidur, kapasitas dalam satu ruangan bahkan ada yang berjumlah 5-7 tersangka, belum lagi masalah tersangka anak yang dicampur dengan tersangka dewasa, serta tidak tersedianya sarana belajar buat anak.

E. PENUTUP

Jaminan perlindungan HAM bagi setiap warga negara termasuk tersangka/terdakwa tertera secara jelas dalam konstitusi Negara Kesatuan RI yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya seperti:

1. Undang-Undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang RI No 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

4. Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun dalam praktek penegakan hukum masih ditemui tindakan penahanan yang melanggar Hak Asasi Manusia berupa perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan misalnya penganiayaan dan penyiksaan dalam pemeriksaan untuk mendapat keterangan dari tersangka, tahanan anak dicampur tahanan dewasa, perlakuan diskriminatif antar sesama tahanan. Penahanan merupakan tindakan aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yaitu:

1. Penahanan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
2. Memenuhi syarat obyektif yaitu tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih atau ancaman pidananya tidak sampai lima tahun tetapi disebut langsung oleh Undang-Undang.
3. Ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, namun dalam praktek penegakan hukum masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dari penyidik dan melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa mulai kasus pencurian ringan yang ancaman hukumannya hingga 3(tiga) bulan, dimana tersangka yang sangat kooperatif yang seyogyanya tidak perlu ditahan namun penyidik tetap melakukan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Campbell Black. *Clack's Law Dictinoray. Fifth edition.* Komnas HAM, Pembaruan RUU KUHAP, 2011
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia.* Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pegabdian Hukum. universitas indonesia, Jakarta.
- Ramdlon Naning 1983 *Cita Dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia,* Jakarta LK UI Hadi Setia Tunggal 2000. *Deklarasi Universal Tentang hak-hak Asasi Manusia* , Harvarinda hlm
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan.*
- Prajudi Admosudirdjo, Juni 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi). Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Philip M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
- Soedikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto dan Sri, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung Alumni, 1992.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Serafina Shinta Dewi, Perlindungan hak-hak anak pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah>, diakses pada 17 november 2012

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

_____, Hasil wawancara mendalam dengan tersangka anak, manado, 5 november 2012

_____, Hasil wawancara mendalam dengan tersangka wanita, manado, 5 november 2012

_____, Hasil wawancara mendalam dengan tersangka, manado, 5 november 2012